

Wujudkan Transparansi Anggaran, Kapolres HSU Gelar Sosialisasi DIPA TA 2021



Sumber gambar:

<https://klikkalsel.com/wujudkan-transparansi-anggaran-kapolres-hsu-gelar-sosialisasi-dipa-ta-2021/>

Kapolres Hulu Sungai Utara (HSU) AKBP Afri Darmawan, S.I.K.,M.H pimpin langsung pembukaan sosialisasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Polres HSU TA 2021 dan Penandatanganan Pakta Integritas Jajaran Polres HSU, hal ini sebagai transparansi anggaran dan komitmen bersama mewujudkan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Polres HSU.

Kegiatan dilaksanakan di Gedung Januraga Polres HSU yang dipimpin langsung oleh Kapolres HSU AKBP Afri Darmawan, S.I.K.,M.H didampingi Wakapolres HSU Kopol Irwan, S.ST.,S.H dan Kabag Ren AKP Agus Tamjid, S.Sos., M.M serta diikuti para Pejabat Utama Polres HSU, para Kapolsek, Kanit, Kasi juga perwakilan Bag, Sat, Sie dan Polsek yang terlibat dalam pertanggung jawaban keuangan (perwabku) di jajaran Polres HSU.

Kegiatan dimulai dengan paparan Dipa TA. 2021 yang disampaikan oleh Kabag Ren Polres HSU AKP Agus Tamjid, S.Sos, M.M. Untuk DIPA Polres HSU Ta. 2021 sebesar Rp37.655.12.000,- (Tiga Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Belas Ribu Rupiah).

Anggaran tersebut dialokasikan untuk 4 Program yaitu:

1. Program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
2. Program alat material khusus (Almatsus) sarana dan prasarana Polri;

3. Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
4. Dukungan manajemen.

Selain sosialisasi DIPA TA 2021 juga dilaksanakan penandatanganan Pakta integritas oleh Kapolres, perwakilan Kabag, Kasat, Kapolsek dan Kasi serta penyerahan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) TA 2021 oleh Kapolres HSU kepada perwakilan pengguna anggaran jajaran Polres HSU.

Dalam sambutan sekaligus arahan Kapolres HSU AKBP Afri Darmawan, S.I.M.K, M.H diantaranya agar para pengguna anggaran untuk segera menyusun rencana penarikan anggaran (renrikgar) sehingga realisasi anggaran sesuai dengan perencanaan.

Lebih lanjut Kapolres menambahkan bahwa tolak ukur prestasi Satker sudah ada melalui penetapan kinerja masing-masing Subsatker. Untuk itu dalam mengelola anggaran harus mengacu kepada 7 prinsip diantaranya Akuntabilitas penggunaan anggaran harus dapat dipertanggung jawabkan, Konsistensi keuangan harus konsisten tidak lepas dari perencanaan, Pay Ability disesuaikan dengan dana yang diterima, Transparansi penggunaan anggaran agar mudah diakses oleh yang berkepentingan, harus sesuai dengan Standar Akutansi khususnya Polri, Integritas pengguna anggaran wajib memiliki integritas dan ke 7 pengolahan anggaran yang digunakan harus sesuai dengan program yang telah ditetapkan. 7 prinsip ini sebagai pedoman kita bersama dalam mengelola anggaran dan sebagai evaluasi DIPA TA 2020 Polres HSU hanya mampu menyerap anggaran 97,90%, diharapkan TA 2021 kali ini paling tidak bisa menyerap 99%, mendekati 100%.

Selanjut Kapolres menekankan kegiatan sosialisasi DIPA ini bukan hanya untuk dipahami saja tetapi kita jadikan komitmen yang kuat untuk keberhasilan kinerja kita dan untuk itu para Kapolsek, para Kasat membackup dalam pengelolaan keuangan.

Sumber berita:

5. <https://klikkalsel.com/wujudkan-transparansi-anggaran-kapolres-hsu-gelar-sosialisasi-dipa-ta-2021/>, 6 Januari 2021.
6. <https://hulusungaiutara.kalsel.polri.go.id/wujudkan-transparansi-anggaran-kapolres-hsu-gelar-sosialisasi-dipa-ta-2021/>, 6 Januari 2021.

Catatan Berita:

Pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Definisi Umum mengenai hal-hal terkait Perencanaan Pembangunan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.¹
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.²
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020– 2024.³
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.⁴

Program Pembangunan Nasional

- Program Pembangunan Nasional periode 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Nasional.⁵
- Rincian dari program pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Undang-Undang ini.⁶
- RPJP Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah.⁷

¹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Pasal 1 angka (1)

² Ibid, Pasal 1 angka (2)

³ Ibid, Pasal 1 angka (3)

⁴ Ibid, Pasal 1 angka (4)

⁵ Ibid, Pasal 2 ayat (1)

⁶ Ibid, Pasal 2 ayat (2)

⁷ Ibid, Pasal 6 ayat (1)

- RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.⁸
- RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memerhatikan RPJM Nasional.⁹
- Pemerintah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Nasional.¹⁰
- Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.¹¹
- Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.¹²

Rincian Program Pembangunan

Kondisi Umum

- Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan, sekaligus, sebagai penopang sistem kehidupan. Adapun jasa-jasa lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengaturan air secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih merupakan penopang kehidupan manusia. Hasil pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup telah mampu menyumbang 24,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan 48 persen terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, pengelolaan sumber daya alam tersebut masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis. Menurunnya daya dukung dan ketersediaan sumber daya alam juga terjadi karena kemampuan iptek yang rendah sehingga tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.¹³
- Kondisi sumber daya hutan saat ini sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan akibat meningkatnya praktik pembalakan liar (illegal logging) dan penyelundupan kayu, meluasnya kebakaran hutan dan lahan, meningkatnya tuntutan atas lahan dan sumber daya hutan yang tidak pada tempatnya, meluasnya perambahan dan konversi

⁸ ibid, Pasal 6 ayat (2)

⁹ ibid, Pasal 6 ayat (3)

¹⁰ ibid, Pasal 7 ayat (1)

¹¹ ibid, Pasal 7 ayat (2)

¹² ibid, Pasal 7 ayat (3)

¹³ Ibid, Lampiran, Bab II. Kondisi Umum, I. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, 1

hutan alam, serta meningkatnya penambangan resmi maupun tanpa izin. Tahun 2004, kerusakan hutan dan lahan di Indonesia sudah mencapai 59,2 juta hektar dengan laju deforestasi setiap tahun mencapai 1,6-2 juta hektar.¹⁴

Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembanguna Jangka Panjang Tahun 2005-2025

- Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.¹⁵
- Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.¹⁶
- Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. Sektor pertanian, dalam arti luas, dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri manufaktur yang berdaya saing global, motor penggerak perekonomian, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.¹⁷
- Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia. Terwujudnya

¹⁴ Ibid, Lampiran, Bab II. Kondisi Umum, I. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, 2

¹⁵ Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, B. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, 1

¹⁶ Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, B. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, 2

¹⁷ Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, B. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, 3

konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.¹⁸

- Meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional.¹⁹
- Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.²⁰
- Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional.²¹
- Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.²²
- Peningkatan dan pengembangan produk-produk unggulan sesuai dengan potensi di masing-masing wilayah dilakukan melalui penumbuhan klaster-klaster industri dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing daerah melalui pengembangan pasar bagi komoditas dan hasil produksi klaster, meningkatkan akses permodalan, memperluas jaringan dan keterkaitan, memanfaatkan riset dan teknologi, pengembangan kelembagaan dan pemantapan iklim bisnis yang kondusif. Selain itu akan dikembangkan pula wilayah-wilayah yang memiliki potensi maritim termasuk potensi wisata bahari dengan menerapkan manajemen modern; serta menumbuhkan lembaga-lembaga pendukung ekonomi

¹⁸ Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, B. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, 4

¹⁹ Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, B. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, 5

²⁰ Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, F. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari, 1

²¹ Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, F. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari, 2

²² Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, F. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari, 3

berbasis maritim seperti asuransi, perbankan, teknologi, industri perkapalan, pendidikan/training kemaritiman, serta kerjasama antar negara.²³

- Kepariwisataaan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi nasional sebagai wilayah wisata bahari terluas di dunia secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa.²⁴

²³ Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005 – 2025, Bagian II Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang, VII. Pembangunan Daerah, 4

²⁴ Lampiran UU No. 17 Tahun 2007 Tentang RPJPN Tahun 2005 – 2025, Bab IV Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, IV.1.2 mewujudkan Bangsa Yang Berdaya Saing, B. Memperkuat Perekonomian Domestik dengan Orientasi dan Berdaya Saing Global, 22